

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II
SEMESTER I JANUARI s/d JUNI 2021**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Lubuk Sikaping
Pada hari *Rabu*, 30 Juni 2021

Management Reprerentative,



AULIA ALI REZA, S.H.
NIP.19920612 201712 1 004

Ketua Tim Survei,



JAFRI ZEN, SH
NIP. 197307221993031001

WAKIL KETUA PENGADILAN
NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II



FORCI NILPA DARMA, S.H., M.H.
NIP.19811030 200312 1 001

TAHUN 2021

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja.....	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian.....	4
2.2. Populasi Dan Sampel.....	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	4
2.5. Teknik Analisis Data.....	5
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	5
BAB III	7
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	7
3.1. Profil responden.....	7
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator.....	10
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	16
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	17
BAB IV	18
PENUTUP	18
4.1. Kesimpulan.....	18
4.2. Rekomendasi.....	19
LAMPIRAN	16
Daftar Pertanyaan.....	17
Pedoman Penilaian.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi

suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam

analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah

7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar SMA/SLTA .

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No.	Pendidikan	Frekuensi	%
1.	Tidak Sekolah	0	0 %
2.	SD	0	0 %
3.	SMP / SLTP	1	3,45 %
4.	SMA / SLTA	22	75,86 %

5.	DIPLOMA (D1)	0	0 %
6.	SARJANA (S1)	6	20,69 %
7.	SARJANA (S2)	0	0 %
	Jumlah	29	100%

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai lainnya.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	Wiraswasta		
2	Pelajar/Mahasiswa		
3	PNS	3	10,34 %
4	POLRI	5	17,24 %
5	Pedagang		
6	Tenaga kontrak	3	10,34 %
7	swasta	4	13,79 %
8	Lainnya	14	48,27 %
	jumlah	29	100

3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun. Bagi kelompok usia di atas 17 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

Tabel 7.
Usia responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	17	58,62

2	29-39	7	24,14
3	40-49	4	13,79
4	50-59	0	
5	Tidak mengisi	1	3,45
		29	100

3.1.4. Jenis Kelamin

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II berdasarkan Jenis Kelamin, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan adalah Laki-laki

Tabel 8.
Jenis Kelamin responden

No	Jenis Kelamin		Frekuensi
1	Laki-laki	21	72,41
2	Perempuan	8	27,59
3	Tidak mencantumkan Jenis Kelamin	-	-
		29	100

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,988

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II bersih dari Manipulasi Peraturan

Tabel 9.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak sesuai prosedur	1	-	%
2.	Jarang sesuai prosedur	2	-	%

3.	sering sesuai prosedur	3	1	2,90%
4.	Selalu sesuai prosedur	4	28	96,55%
			290	100 %

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4.000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II bersih dari Penyalahgunaan Jabatan

Tabel 10.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Petugas melayani selalu meminta imbalan	1	-	0 %
2.	Petugas melayani sering meminta imbalan	2	-	0 %
3.	Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	-	0 %
4.	Petugas melayani Selalu meminta imbalan	4	29	100 %
			29	100

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II bersih dari menjual pengaruh;

Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	selalu	1	-	0 %
2.	sering	2	-	0 %
3.	Jarang/pernah	3	-	0 %
4.	Tidak pernah	4	29	100 %
			29	100

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,988

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II bersih dari transaksi biaya;

Tabel 12.

Indeks pada indikator transaksi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak pernah	1	-	%
2.	Jarang	2	-	%
3.	Sering	3	1	2,90%
4.	Selalu	4	28	96,55%
			290	100 %

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4.000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II bersih dari Biaya

Tambahan

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator biaya tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak pernah	1	-	0 %
2.	Jarang	2	-	0 %
3.	Sering	3	-	0 %
4.	Selalu	4	29	100 %
			29	100

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II bersih dari biaya tambahan

Tabel 14.

Indeks pada indikator tambahan biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	-	0 %
2.	Sering	2	-	0 %
3.	Jarang /pernah	3	-	0 %
4.	Tidak pernah	4	29	100 %
			29	100

3.2.7. Indikator Transparansi biaya pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4.000

Indeks dapat diartikan

Tabel 15.

Indeks pada indikator transparansi biaya pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak pernah	1	-	0 %
2.	Jarang	2	-	0 %
3.	Sering	3	-	0 %
4.	Selalu	4	29	100 %
			29	100

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transpparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II Bersih dari Percaloan

Tabel 16.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	-	0 %
2.	Sering	2	-	0 %
3.	Jarang /pernah	3	-	0 %
4.	Tidak pernah	4	29	100 %
			29	100

3.2.9. Indikator perbuatan curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II bersih dari
Tindakan perbuatan curang

Tabel 17.

Indeks pada indikator percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	-	0 %
2.	Sering	2	-	0 %
3.	Jarang /pernah	3	-	0 %
4.	Tidak pernah	4	29	100 %
			29	100

3.2.10. Indikator transaksi rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II Bersih dari transaksi rahasia

Tabel 18.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	-	0 %
2.	Sering	2	-	0 %
3.	Jarang /pernah	3	-	0 %
4.	Tidak pernah	4	29	100 %
			29	100

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II sebesar 3,99

Tabel 19.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	d	4	288	99,31 %
2.	c	3	2	0,69 %
3.	b	2	0	0%
4.	a	1	0	0%
			290	100

Indeks 3,99 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 99,83 atau pada interval 81,26 - 100.00;

Tabel 20.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan agar di pertahankan
2. Tingkatkan lagi agar lebih baik
3. pertahankan

Tabel 21.

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
Kelas II**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Tingkatkan pelayanan Pn.Lubuk Sikaping supaya lebih memuaskan lagi
2	Pertahankan yang telah ada dan tingkatkan yang masih kurang
3	Bias dan dapat mempertahankan aturan yang ada sekarang
4	Tingkatkan pelayanan Pn.Lubuk Sikaping supaya lebih memuaskan lagi
5	Pertahankan yang telah ada dan tingkatkan yang masih kurang
6	Bisa dan dapat mempertahankan aturan yang ada sekarang
7	Saran dari kami pelayanan sudah sangat baik semoga bias ditingkatkan lagi
8	Semoga bisa dipertahankan
9	Pelayanan sangat baik harap dipertahankan
10	Lanjutkan sama seperti ini/sekarang

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,99 **atau** masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,98
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,98

5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00
7. Indikator Transparansi pembayaran, mendapat indeks 4,00
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II



PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II
JALAN JEND. SUDIRMAN NO.64 TELP.(0753) 20008-20163
LUBUK SIKAPING 26311
 website pn-lubuksikaping.go.id email pnlbsikaping@gmail.com

Tahun 2019 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,99 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Indikator Transaksi Biaya memiliki indeks paling rendah di antara indikator lainnya.

LAMPIRAN

Nomor Kuesioner : (diisi petugas)

Tanggal :

DAFTAR PERTANYAAN **SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI** **PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr Pengguna Layanan _____

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik kami sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tujuan penyebaran kuesioner ini adalah untuk memetakan persepsi dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi Melalui Survei Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II, kami berharap dapat memetakan potensi korupsi untuk mendorong perbaikan layanan publik serta membangun etos kerja layanan yang bersih dan bebas korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II.

Kami sangat menghargai kejujuran dan objektivitas bapak/ibu dalam mengisi seluruh data survei ini. Partisipasi bapak/ibu sebagai responden secara tidak langsung sudah membantu upaya pemberantasan korupsi di wilayah NKRI. Kami menjamin bahwa semua data responden dan jawaban yang diberikan bersifat RAHASIA serta tidak akan dipublikasikan sebagai jawaban pribadi responden .

Atas kerja sama yang Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan terima kasih

Tim Survey

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama :(boleh inisial atau tidak diisi)

2. Instansi/Perusahaan :

3. Umur (Tahun) :

...

4. Jenis Kelamin : 1. Laki – laki 2. Perempuan
5. Pendidikan terakhir : 1. Tidak sekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
 2. SD 6. Sarjana (S1)
 3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)
 4. SLTA
5. Pekerjaan Utama : 1. PNS 5. Petani/Nelayan
 2. TNI/Polri 6. Pedagang
 3. Pegawai Swasta Mahasiswa 7. Pelajar /
 4. Wiraswasta Lainnya..... 8.

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara pengisian Kuesioner
 Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei		Nilai Persepsi
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)	JAWABAN	
(1)	(2)	
1. Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	a. Tidak sesuai prosedur b. Jarang sesuai prosedur c. Sering sesuai prosedur d. Selalu sesuai prosedur	1 2 3 4
2. Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?	a. Petugas melayani selalu meminta imbalan b. Petugas melayani sering meminta imbalan c. Petugas melayani jarang meminta imbalan d. Petugas melayani tanpa meminta imbalan	1 2 3 4

3.	Pernakah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?	a. Selalu b. Sering c. Jarang/Pernah d. Tidak Pernah	1 2 3 4
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
5.	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
6.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang/Pernah d. Tidak Pernah	1 2 3 4
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan?	a. Tidak pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang/Pernah d. Tidak Pernah	1 2 3 4
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang/Pernah d. Tidak Pernah	1 2 3 4
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang/Pernah d. Tidak Pernah	1 2 3 4

SARAN SARAN PERBAIKAN :

.....
 ...

 ...

PETUGAS PELAKSANA :

1. Petugas :

- Nama :
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

2. Pencacah/Penghitung hasil survei :

- Nama :

➤ Tanda Tangan :

➤ Tanggal Pelaksana :

3. Pengawas/Pemeriksa :

➤ Nama :

➤ Tanda Tangan :

➤ Tanggal Pelaksana :

PEDOMAN PENILAIAN :

PENILAIAN HASIL SURVEY						
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)		a	b	c	d	Kode Pengolahan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Eksternal						
1.	Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? (Manipulasi Peraturan)	4	3	2	1	
2.	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)	4	3	2	1	
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan	4	3	2	1	

	pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? (Menjual Pengaruh)					
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? (Transaksi Biaya)	4	3	2	1	
5.	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? (Biaya Tambahan)	4	3	2	1	
6.	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? (Hadiah)	4	3	2	1	
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi pembayaran)	4	3	2	1	
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? (Percaloan)	4	3	2	1	
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? (Perbuatan Curang)	4	3	2	1	
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan? (Transaksi Rahasia)	4	3	2	1	

PENGELOLAAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI

	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN										Keterangan
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	115	116	116	115	116	116	116	116	116	116	
	3,988	4,000	4,000	3,988	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
											39,931
											1
	0,39	0,40	0,40	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	3,993
											10
											3,99
											0,1

Keterangan :

Q1 - Q10 : Unsur-unsur Pertanyaan

NRR : Nilai Rata-rata

IPK : Indeks Persepsi Korupsi

*) : Jumlah NRR IPK Tertimbang

NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi

Jumlah kuesioner yang terisi

IPK : 3.99

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata	Dseripsi
Q 1	Manipulasi Data	0,397	115
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	0,400	116
Q 3	Menjual Pengaruh	0,400	116
Q 4	Transaksi Rahasia	0,397	115
Q 5	Biaya Tambahan	0,400	116
Q 6	Hadiah	0,400	116
Q 7	Tranparansi Biaya	0,400	116
Q 8	Percaloan	0,400	116
Q 9	Perbuatan Curang	0,400	116
Q 10	Transaksi Rahasia	0,400	116
		3,993	1158

Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	2	3	4
1,00-1,75	25,00-43,75	1	Selalu
1.76-2.50	43.76-62.50	2	Sering
2,51-3,25	62,51-81,25	3	Cukup
3,26-4,00	81,26-100,00	4	Tidak Ada